

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, PEMBAYARAN BUNGA UTANG, DAN SUBSIDI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1999-2013

Hangga Filardikh Bachtiar ¹⁾, Eleonora Sofilda ²⁾, Sri Yani Kusumastuti ³⁾

1) Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti
E-mail: hangga24@yahoo.com

2) Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti
Email: eleonora_140872@yahoo.com

3) Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti
Email: sriyanik@gmail.com

Abstrak

Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara termasuk kebijakan anggaran belanja pemerintah pusat, menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan yang berkelanjutan dan berdimensi kewilayahan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara, pemerintah dapat secara langsung berperan dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan di segala bidang kehidupan, mendukung stabilitas ekonomi, serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pertumbuhan belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, dan subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat dan pertumbuhan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, dan subsidi sebagai variabel bebas. Data yang digunakan adalah data sekunder periode 1999 hingga 2013 yang berasal dari Data Pokok APBN, laporan BPS, dan Nota Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan belanja modal, pembayaran bunga utang dan subsidi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dua variabel bebas lainnya yakni belanja barang dan belanja pegawai tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

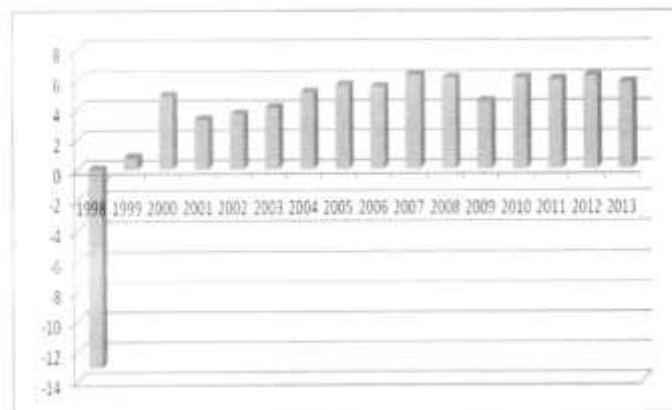
Kata kunci: belanja pemerintah, bunga utang, subsidi, pertumbuhan ekonomi

Pendahuluan

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara termasuk kebijakan anggaran belanja pemerintah pusat, sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan yang berkelanjutan dan berdimensi kewilayahan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara, pemerintah dapat secara langsung berperan aktif dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan di segala bidang kehidupan, mendukung stabilitas ekonomi, serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata. Anggaran belanja pemerintah pusat memiliki dua peran penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertama, besaran dan komposisi belanja pemerintah pusat memiliki dampak signifikan pada permintaan agregat yang merupakan penentu output nasional. Kedua, berkaitan dengan ketersediaan dana untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi pemerintah, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Oleh karena itu, kualitas kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Gambar 1, lebih dari 1 dasawarsa terakhir pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan signifikan, dimana sejak tahun 1999 hingga 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tren positif. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya porsi belanja pemerintah dari tahun ke tahun, dimana pada tahun

2001 belanja pemerintah hanya sebesar Rp263,7 trilyun terus meningkat hingga pada tahun 2013 sebesar Rp1.657,9 trilyun atau meningkat lebih dari 500%.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1998-2013

Jika dilihat distribusi alokasi anggaran belanja pemerintah tahun 2013, sebanyak Rp348,1 trilyun (lebih dari 30%) dihabiskan untuk subsidi, sedangkan belanja modal untuk membangun fasilitas masyarakat dan infrastruktur hanya sebesar Rp192,6 trilyun (11,62%). Sementara itu, pembayaran bunga utang menjadi belanja terendah, sebesar 6,7%. Adanya ketimpangan alokasi ini, menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas kebijakan dan penganggarannya. Tingginya angka subsidi juga menyebabkan timbulnya persepsi di masyarakat sebagai bentuk pemborosan, salah sasaran, dan dirasakan belum memberikan kontribusi berarti terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Disisi lain sebagian berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah resiko kegagalan pasar, menstabilkan tingkat konsumsi, menahan laju inflasi yang pada akhirnya akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Pengurangan atau pencabutan subsidi akan menjadi efek domino bagi kenaikan harga-harga barang kebutuhan masyarakat lainnya.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan belanja barang terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan pembayaran bunga utang terhadap pertumbuhan ekonomi?
5. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi?

Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengestimasi besarnya pengaruh pertumbuhan belanja barang terhadap pertumbuhan ekonomi;
2. Untuk mengestimasi besarnya pengaruh pertumbuhan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi;
3. Untuk mengestimasi besarnya pengaruh pertumbuhan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi;
4. Untuk mengestimasi besarnya pengaruh pertumbuhan pembayaran bunga utang terhadap pertumbuhan ekonomi;
5. Untuk mengestimasi besarnya pengaruh pertumbuhan subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi.

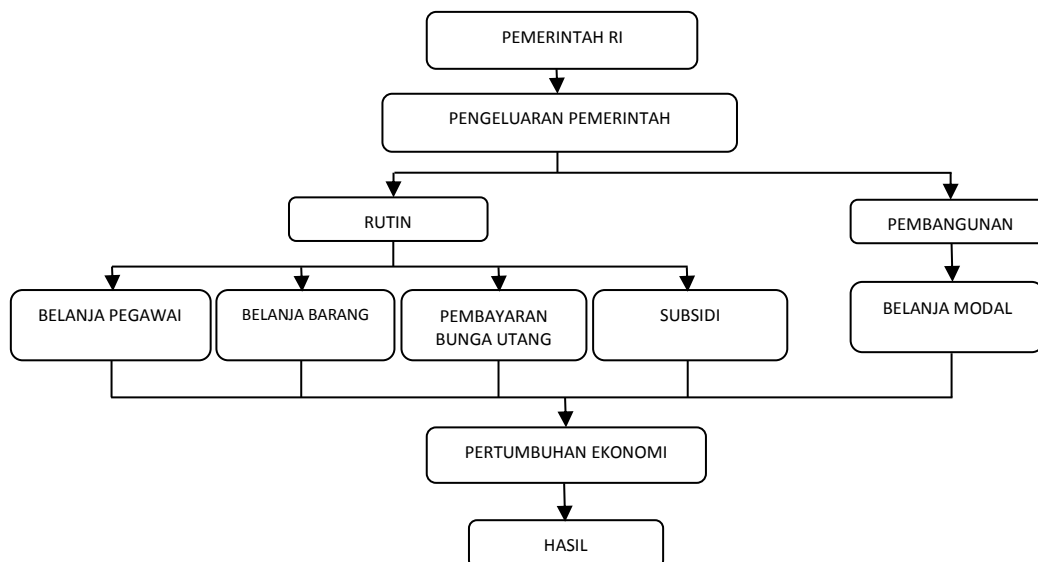
Studi Pustaka

Pertumbuhan ekonomi menurut Sukimo (2013) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Penambahan ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan jumlah maupun kualitasnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets (dalam Jhingan, 2010) adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Dengan bahasa lain, Boediono (2009) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang.

Pengeluaran Pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukimo, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Menurut Mangkoesoebroto (2009), pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Teori-teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang antara lain, teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan Harrod-Domar, teori pertumbuhan neo-klasik, teori Schumpeter, dan teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dijelaskan pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh pertumbuhan belanja barang terhadap pertumbuhan ekonomi;
2. Terdapat pengaruh pertumbuhan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi;
3. Terdapat pengaruh pertumbuhan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi;
4. Terdapat pengaruh pertumbuhan pembayaran bunga utang terhadap pertumbuhan ekonomi;
5. Terdapat pengaruh pertumbuhan belanja subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Data Pokok APBN, laporan BPS, dan Nota Keuangan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengeluaran pemerintah, yaitu tindakan pemerintah untuk mengatur perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun, yang tercermin dalam APBN dan APBD;
2. Belanja barang, yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan;
3. Belanja pegawai, yaitu kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah di dalam maupun di luar negeri;
4. Pembayaran bunga utang, yaitu belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang;
5. Belanja subsidi, yaitu pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat;
6. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset;
7. Pertumbuhan ekonomi, yaitu proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang.

Metode analisis yang digunakan untuk mengestimasi model penelitian adalah model regresi linier berganda. Untuk mengetahui pengaruh hubungan variabel-variabel independen (belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, dan subsidi) terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) periode 1999-2013, digunakan model sebagai berikut:

$$Pe_t = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \beta_5 X_{5t} + \mu \quad (1)$$

dimana: PE = pertumbuhan ekonomi (%) pada tahun t;
 X_{1t} = pertumbuhan belanja barang di Indonesia (%);
 X_{2t} = pertumbuhan belanja pegawai di Indonesia (%);
 X_{3t} = pertumbuhan belanja modal di Indonesia (%);
 X_{4t} = pertumbuhan pembayaran bunga utang (%);
 X_{5t} = pertumbuhan subsidi di Indonesia (%);
 a = intercept
 $\beta_1 \dots \beta_5$ = koefisien regresi; dan
 μ = variabel error

Selain pengujian dengan model tersebut, akan dilakukan juga uji t statistik, uji F statistik, Goodness of Fit Test, uji penyimpangan asumsi klasik, dan uji stasioneritas.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, enam variabel yang digunakan dalam model, yaitu pertumbuhan ekonomi, belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga, dan subsidi telah stationer. Hal ini dikarenakan variabel-variabel tersebut telah memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,01 ($\alpha = 1\%$) dan 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Berdasarkan hasil uji t-statistik, uji F-statistik, Goodness of Fit Test, uji penyimpangan asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), dan uji stasioneritas, dapat disimpulkan bahwa data-data yang diolah telah lulus

keseluruhan uji. Hasil uji serentak (uji F-statistik) menunjukkan nilai prob dari F-stat sebesar 0.00000 (menggunakan $\alpha = 5\%$) yang artinya secara bersama-sama variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan belanja pegawai, pertumbuhan belanja barang, pertumbuhan belanja modal, pertumbuhan pembayaran bunga utang, dan pertumbuhan subsidi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan berdasarkan uji individual (uji t-statistik) didapatkan hasil bahwa pertumbuhan belanja pegawai, pertumbuhan belanja barang, pertumbuhan belanja modal, dan pertumbuhan pembayaran bunga utang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan subsidi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. Unit Root Test

VARIABEL	STATISTIK	PROBABILITY	STATIONER
Pertumbuhan Ekonomi	-4.023588	0,0097***	Level, Intercept
Belanja Barang	-4.401254	0,0049***	Level, Intercept
Belanja Pegawai	-11.45406	0,0000***	Level, Intercept
Belanja Modal	-3.638536	0,0241***	Level, Intercept
Pembayaran Bunga	-5.538678	0,0000***	Level, none
Subsidi	-3.054102	0,0051***	Level, none

Sumber: Nota Keuangan, Badan Pusat Statistik (Data Diolah Eviews 4.0)

Tabel 2. Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.		
C	3,043357	0,700974	4,341609	0,0034		
BARANG	-0,004453	0,006804	-0,654571	0,5337		
PEGAWAI	-0,014156	0,028510	-0,496538	0,6347		
MODAL	-0,018345	0,009029	-2,031896	0,0817		
BUNGA	-0,045300	0,016281	-2,782331	0,0272		
SUBSIDI	0,006657	0,003222	2,066070	0,0777		
PE(-1)	0,595373	0,169957	3,503074	0,0100		
R-squared	0,735622	Mean dependent var		5,262857		
Adjusted R-squared	0,509013	S.D. dependent var		1,031746		
S.E. of regression	0,722949	Akaike info criterion		2,495896		
Sum squared resid	3,658585	Schwarz criterion		2,815425		
Log likelihood	-10,47127	F-statistic		2,466318		
Durbin-Watson stat	3,246215	Prob(F-statistic)		1,678821		
Diagnostic test:						
Normality: Jarque-Bera	0,099785	Probability		0,9513		
LM Test: Obs*Rsquared	0,245950	Probability		0,6199		
White Test: Obs*Rsquared	5,585732	Probability		0,4712		
Multikolinearitas Test:						
	BARANG	PEGAWAI	MODAL	BUNGA	SUBSIDI	PE(-1)
BARANG	1,000000	0,183635	-0,328256	0,039758	-0,188356	0,084746
PEGAWAI	0,183635	1,000000	0,587456	0,002736	0,148787	0,607382
MODAL	-0,328256	0,587456	1,000000	-0,166840	0,193345	0,427180
BUNGA	0,039758	0,002736	-0,166840	1,000000	0,342823	0,187870
SUBSIDI	-0,188356	0,148787	0,193345	0,342823	1,000000	0,181705
PE(-1)	0,084746	0,607382	0,427180	0,187870	0,181705	1,000000

Sumber: Nota Keuangan, Badan Pusat Statistik (Data Diolah Eviews 4.0)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah melakukan stimulus melalui subsidi untuk mengatasi masalah kegagalan pasar dan mempertahankan daya beli

masyarakat dapat diterima. Signifikansi yang tinggi juga memberikan keyakinan bahwa kebijakan subsidi memang dibutuhkan. Selain itu, semakin besar keinginan pemerintah untuk menyelesaikan beban utangnya akan mengakibatkan kas negara semakin berkurang yang pada akhirnya menyebabkan semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi. Dalam mengelola utangnya, kebijakan pemerintah yang lebih baik ditempuh adalah melakukan reschedule pengembalian utang secara bertahap dan pembatasan pinjaman baru. Sementara itu, nilai manfaat dari belanja modal pemerintah tidak dirasakan secara cepat, padahal nilai investasi yang dikeluarkan cukup besar dan prosesnya lebih dari satu tahun (multi years). Pertumbuhan belanja pegawai dan belanja barang tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Persentase jumlah PNS yang kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, serta belanja barang yang tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional perkantoran instansi pemerintah, merupakan penyebab tidak signifikannya kedua variabel ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

1. Variabel pertumbuhan subsidi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Variabel pertumbuhan pembayaran bunga utang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Variabel pertumbuhan belanja modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Kedua variabel bebas lainnya (pertumbuhan belanja pegawai dan belanja barang) yang juga diuji secara individu tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

Alexiou, C., 2009, Government Spending and Economic Growth: Economic Evidence from the South Eastern Europe, *Journal of Economic and Social Research II (I)* 2009, 1-16.

Badan Pusat Statistik, 2014, *Neraca Pemerintahan Pusat: Quarterly Central Government Accounts*, BPS, Jakarta.

Boediono, 2009, *Ekonomi Makro*, BPFE, Yogyakarta.

Ginting, A.M., Analisa Kebijakan Subsidi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, diambil 15 Agustus 2014, dari <http://www.scribd.com>.

Holzner, M., 2010, Inequality, Growth and Public Spending in Central, East and Southeast Europe, *VIIW Working Papers*, Vienna.

Hsieh, E. and K.S. Lai, 1994, Government spending and economic growth: the G-7 experience, *Applied Economics*, 1994, 26, 535-542.

Jhingan, M.L., 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Press, Jakarta.

Jiranyakul, Komain, 2007, The Relation between Government Expenditures and Economic Growth in Thailand. *MPRA*. Munich.

Malau, M.K., 2005, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, FII USIJ, Medan.

Mallick, O.B., 2005, *Development Theory: Rostow's Five-Stage Model of Development and Its Relevance in Globalization*, School of Social Science Faculty of Education and Arts, The University of Newcastle.

Mangkoesebroto, G., 2009, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta.

Martinussen. J., 1997, *Society, State and Market: A Guide to Competing Theories of Development*. Zed Books, London.

Peters, A., 2002, An Application of Wagner's 'law' of Expanding State Activity to Totally Diverse Countries, *Transition*, Issue 31.

Qudratullah M.F., 2013, *Analisis Regresi ferapan: Teori, Contoh Kasus, Dan Aplikasi Dengan SPSS*, Andi Publisher.

Sinha, D., 1998. Economic growth and government expenditure in China. *MPRA*. Munich.

Sukirno, S., 2000, *Makroekonomi Modern : perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2013, *Makroekonomi: Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Rajawali Press, Jakarta.

Todaro, M.P., 2014, *Economic Development, 12/E*, Prentice Hall, New Jersey.